

Pemberdayaan Masyarakat melalui Program "Kampung Cibunut Berwarna" di Kota Bandung

Ely Sufianti^a, Cintantya Andhita Dara Kirana^b, Rike Anggun Artisa^c

^{abc} Politeknik STIA LAN Bandung

e-mail : ^asufiantiely@gmail.com , ^bdara@poltek.stialanbandung.ac.id,

^crikeanggunartisa@gmail.com

Abstrak

Keterbelakangan di wilayah desa merupakan suatu bukti kurangnya perhatian dan bantuan serta stimulan dari pemerintah dalam hal pengembangan potensi suatu desa. Terlebih dengan adanya suatu ketimpangan pembangunan di tingkat kota dan desa yang membuat desa semakin tidak optimal dalam pemberdayaannya. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu strategi untuk dapat menggali potensi desa sehingga desa bisa berkembang sesuai dengan potensi yang dimiliki dari kekuatan internal yaitu potensi masyarakatnya. Salah satu desa yang sedang mengoptimalkan potensi dengan cara memberdayakan masyarakatnya adalah Kampung Cibunut yang berada di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung. Masyarakat Kampung Cibunut mengubah konsep kampung mereka menjadi "Kampung Cibunut Berwarna". Tujuan dari dilakukannya kajian terhadap pemberdayaan masyarakat Kampung Cibunut ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses pemberdayaan masyarakat dalam Program "Kampung Cibunut Berwarna" di Kota Bandung. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat bisa dilakukan melalui penguatan kolaborasi antar aktor pembangunan yang dalam hal ini adalah berkaitan dengan pembangunan sosial kemasyarakatan secara komprehensif juga pembangunan yang bersifat fisik berupa tersedianya infrastruktur dan sarana prasarana penunjang kegiatan masyarakat desa sehingga masyarakat desa dapat menciptakan "Kampung Cibunut Berwarna".

Kata Kunci: Pemberdayaan Masyarakat, Partisipasi, Kampung Cibunut Berwarna, Bandung

Community Empowerment through "Kampung Cibunut Berwarna" Program in The City of Bandung

Abstract

Underdevelopment in the village area is a proof of inattention and assistance and stimulants from the government in terms of the potential development of a village. Especially with a development inequality at the city and village level that makes the village more not optimal in its empowerment. Community empowerment is one of the strategies to be able to explore the potential of the village so that the village can develop in accordance with the potential of the internal forces, namely the potential of the community. One village that is optimizing its potential by empowering its people is Kampung Cibunut which is located in Sumur Bandung Sub-District, Bandung City. The people of Cibunut Village changed the concept of Cibunut village to "Kampung Cibunut Berwarna". The purpose of the study of the empowerment of the people of Kampung Cibunut is to find out how the community empowerment process in the "Kampung Cibunut Berwarna" Program in the city of Bandung. The result of this research is that community empowerment can be done through strengthening collaboration between development actors which in this case is related to comprehensive community social development as well as physical development in the form of infrastructure and infrastructure facilities supporting village community activities so that village communities can create "Kampung Cibunut Berwarna".

Keywords : Community Empowerment, Participation, Kampung Cibunut Berwarna, Bandung

A. PENDAHULUAN

Pemberdayaan merupakan sesuatu yang mutlak terjadi dalam proses pembangunan. Karena pembangunan saat ini tidak hanya menjadikan masyarakat sebagai objek pembangunan melainkan juga subyek pembangunan, yang artinya masyarakat secara penuh dapat memegang kendali terhadap jalannya suatu proses pembangunan. Dengan adanya pemberdayaan masyarakat, masyarakat dapat memberikan kontribusi dan partisipasinya mulai dari tahapan perencanaan sampai dengan monitoring sebuah program.

Pembangunan pada suatu daerah dimulai dari lingkup yang paling terkecil adalah pembangunan yang dijalankan pada suatu desa. Masyarakat desa terkenal dengan budayanya yang guyub dan kental nilai gotong royongnya. Nilai nilai yang terkandung dalam masyarakat desa tersebut menjadi suatu modal sosial untuk kemajuan serta pengembangan suatu desa. Salah satu desa yang berhasil untuk menggerakkan partisipasi dan menjalankan pemberdayaan masyarakat adalah Kampung Cibunut yang berada di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung

Kampung Cibunut beberapa tahun terakhir ini telah mengalami perubahan dalam hal lingkungan dan sosial kemasyarakatannya. Tingkat interaksi masyarakat dan unsur budaya masyarakat yang guyub di dalam kampung tersebut sangat tinggi. Kondisi kampung Cibunut pada beberapa tahun yang lalu tergolong tidak tertata dan lingkungan permukimannya juga tidak indah sekarang. Bahkan kampung ini sangat rawan dengan bencana banjir.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung berkolaborasi dengan masyarakat dan *stakeholder* terkait dalam hal pengelolaan lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Kampung Cibunut merespon anjuran pemerintah tersebut dengan menata kampungnya menjadi kampung yang bersih, nyaman dan berwarna dengan sebutan "Kampung Cibunut Berwarna".

B. PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep partisipasi publik untuk menganalisis fenomena dan data yang didapatkan dari hasil

observasi dan wawancara dengan narasumber terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan "Kampung Cibunut Berwarna". Dalam mengimplementasikan paradigma *governance*, partisipasi para pemangku kepentingan merupakan suatu hal yang mutlak diperlukan. Karena berkaitan dengan proses pembuatan keputusan publik, maka partisipasi tidak hanya berarti kehadiran. Dalam proses ini, tingkat partisipasi dilihat dari tangga partisipasi Arnstein (1969) yaitu:

1. *Manipulation* (Manipulasi). Tingkat partisipasi ini adalah yang paling rendah, yang memposisikan masyarakat hanya dipakai sebagai pihak yang memberikan persetujuan.
2. *Theraphy* (terapi/penyembuhan). Masyarakat dilibatkan dalam aktivitas yang lebih luas, tapi lebih fokus kepada "mengobati", bukan "mencegah penyakitnya".
3. *Informing* (informasi). Merupakan tahap awal dari partisipasi, hanya seringkali bersifat satu arah, dari petugas kepada masyarakat. Dengan demikian, masyarakat memiliki sedikit kesempatan untuk mendapatkan program yang memberi manfaat bagi mereka. Alat yang umum digunakan adalah suart kabar, poster, atau pamflet.
4. *Consultatin* (konsultasi). Mengundang belum tentu menerima pendapat masyarakat, hal ini merupakan tahap awal dari partisipasi. Namun, seringkali pendapat mereka tidak dijamin akan dimasukkan ke dalam keputusan. Alat yang umum digunakan adalah survei dan pertemuan masyarakat untuk menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat.
5. *Placation* (penentraman/perujukan). Pendapat masyarakat mulai diperhitungkan, tapi pemegang kekuasaan memiliki hak menilai pendapat tersebut. Tingkat penghargaan terhadap pendapat masyarakat tergantung pada dua faktor, yaitu bantuan teknis tentang penekanan

Inovasi Pelayanan dan Kepemimpinan Publik Menghadapi
Era Society 5.0

- prioritas dan sejauh mana masyarakat dapat menkankan prioritas mereka.
6. *Partnership* (kerjasama). Pada posisi ini terdapat distribusi kekuasaan melalui negosiasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Mereka menyetujui membagi tanggung jawab perencanaan dan pengambilan keputusan melalui dewan kebijakan yang mereka bentuk. Terjadi proses memberi dan menerima.
 7. *Delegated power* (pelimpahan kekuasaan). Negosiasi antara masyarakat dan pemerintah dapat menghasilkan keputusan yang didominasi oleh masyarakat berkaitan dengan kegiatan/program tertentu. Pada tingkat ini masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk memberikan keputusan dominan pada rencana atau program tertentu. Untuk memecahkan perbedaan yang muncul, pemilik kekuasaan harus mengadakan tawar-menawar dengan masyarakat dan tidak dapat memberikan tekanan-tekanan dari atas. Jadi masyarakat diberi wewenang untuk membuat keputusan rencana dan rencana tersebut kemudian ditetapkan oleh pemerintah.
 8. *Citizen Control* (kontrol masyarakat). Permintaan masyarakat untuk mengendalikan program semakin meningkat. Pada tingkat ini masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program atau kelembagaan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Mereka mempunyai kewenangan dan dapat mengadakan negosiasi dengan pihak-pihak luar yang hendak melakukan perubahan. Dalam hal ini usaha bersama warga dapat langsung berhubungan dengan sumber-sumber dana untuk mendapat bantuan atau pinjaman tanpa melalui pihak ketiga. Jadi masyarakat memiliki kekuasaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengawasi program yang dibuatnya.

Manipulation dan therapy sebenarnya dapat dikategorikan sebagai non partisipasi, karena masih kuatnya posisi pemegang kekuasaan

(pemerintah terhadap keputusan mengenai program/kegiatan). *Informing, consultation, dan placation* dapat dikelompokkan sebagai bentuk adanya bukti partisipasi, dan tingkatan *partnership, delegated power, dan citizen control* memperlihatkan adanya kekuatan masyarakat untuk mengendalikan kegiatan program sesuai dengan kebutuhan mereka, masyarakat memiliki andil besar dalam tingkatan ketiga partisipasi tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori partisipasi publik, partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat telah mencapai semua tahapan, mulai dari tahapan manipulasi dimana masyarakat setempat masih belum memiliki kesadaran penuh untuk ikut berpartisipasi, bisa dikatakan masyarakat masih apatis terhadap kebijakan untuk mengelola Kampung Cibunut menjadi Kampung Percontohan dalam hal kebersihannya. Kemudian dari proses yang cukup Panjang melalui sosialisasi terus menerus, dan pelibatan masyarakat terhadap pengelolaan kampung Cibunut, saat ini masyarakat sudah sampai pada tahapan *Citizen Control*, dimana masyarakat dapat mengendalikan program "Kampung Cibunut Berwarna" secara massif. Masyarakat memiliki kekuatan untuk mengatur program dan kelembagaan yang ada. Masyarakat juga bisa produktif dengan berkembangnya Kampung Cibunut Berwarna, karena banyak masyarakat yang tertarik untuk berkunjung kesana sehingga potensi pariwisata semakin dapat dikembangkan. Pihak-pihak yang berada pada sektor industri pariwisata juga turut berkontribusi untuk menjalin kerjasama sehingga Kampung Cibunut Berwarna semakin dikenal oleh masyarakat pada umumnya.

Salah satu bentuk pembangunan kawasan yang dilandasi oleh pemberdayaan masyarakat adalah pembangunan Kampung Cibunut, Kota Bandung. Kampung Cibunut merupakan salah satu kampung yang menjadi *pilot project* kampung kreatif di Kota Bandung. Dengan julukannya "Kampung Cibunut Berwarna", kampung Cibunut dapat membuktikan kepada masyarakat secara luas bahwa potensi suatu daerah dapat digali dan dikembangkan jika diawali dari semangat masyarakat lokal untuk membangun daerahnya secara konsisten. Sampai sekarang Kampung Cibunut ramai didatangi wisatawan

yang berkunjung ke Kota Bandung untuk melihat keindahan dari “Kampung Cibunut Berwarna”.

Kampung Cibunut menjadikan kampungnya lebih berwarna dengan membagi zona menjadi 5 bagian sistem zonasi warna. Setiap Rukun Tetangga (RT) 1 warna dan terbagi atas 5 zona mural dengan setiap 1 konsep mural terdapat pada 2 RT. Konsep 5 zona mural tersebut adalah sebagai berikut:

1. Zona World Peace
Merupakan mural yang bertema perdamaian dunia, Zona World Peace terdapat pada RT 09 dan RT 07.
2. Zona World Insight
Merupakan mural yang bertema edukasi dan wawasan dunia, terdapat di RT 04
3. Zona Bandung Local Genius
Dengan memunculkan kearifan lokal Bandung, tema mural ini berisi tentang Bandung, terdapat di RT 08 dan RT 03.
4. Zona Budaya dan Tradisi
Tema mural budaya dan tradisi yaitu terdapat di RT 01 dan RT 02.
5. Zona Bermain
Konsep zona bermain diperuntukan sebagai edukasi terhadap anak-anak, mural ini terdapat di RT 05 dan RT 06

Ide mewarnai kampung tersebut berawal dari pendekatan pemuda ke masyarakat yang dilakukan secara bertahap dengan mendatangi satu rumah ke rumah yang lain (*door to door*). Konsep pendekatan secara (*door to door*) ini merupakan cara yang efektif agar masyarakat dapat tersosialisasi dengan baik berkenaan dengan program “Kampung Cibunut Berwarna”. Dengan mendatangi rumah warga, para penggagas program juga mendapatkan ide atau saran tambahan dari masyarakat berkaitan dengan pengoptimalan pembangunan menuju “Kampung Cibunut Berwarna”. Pendekatan tersebut kemudian berlanjut kepada warga sekitar yang lebih senior. Dengan didorongnya semangat pemuda yang tinggi serta kolaborasi yang kuat antara semua pihak, seperti ketua RW, ketua RT, fasilitator dan seluruh masyarakat, maka terbentuk suatu musyawarah tentang program perbaikan kampung. Hasil dari musyawarah tersebut adalah adanya masyarakat yang pro dan kontra akan diberlakukannya program

“Kampung Cibunut Berwarna”. Sebagian masyarakat tidak setuju dengan pembagian warna dengan sistem zonasi yang telah ditetapkan dan sebagian tidak ingin rumahnya dicat kembali serta keraguan masyarakat akan keberhasilan program tersebut. Namun sebagian besar masyarakat setuju untuk mengubah lingkungan permukiman mereka menjadi berwarna sesuai dengan pembagian warna yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, diambil suatu kesepakatan warga melalui mufakat bahwa warga setuju untuk membantu para pemuda kreatif dalam merealisasikan program “Kampung Cibunut Berwarna” yang sampai saat ini menjadi kampung indah yang layak huni juga memberikan dampak positif terhadap kehidupan kemasyarakatan di Kampung Cibunut.

PENUTUP DAN REKOMENDASI

Penguatan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat merupakan modal yang dimiliki suatu desa untuk dapat memaksimalkan, menggali serta mengembangkan potensi lokalnya. Pemerintah memiliki fungsi untuk melakukan stimulasi dan dorongan kepada masyarakat untuk dapat berkontribusi aktif dalam pembangunan. Pemberdayaan masyarakat menjadi hal yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, dimana masyarakat merasa dibutuhkan kontribusinya sehingga dapat mengoptimalkan kemampuan yang dimiliki untuk membangun desanya. Desa tidak lagi bergantung kepada sumber daya yang dimiliki tetapi harapannya desa dapat menembus keterbatasan dari terbatasnya sumber daya. Sumber daya di desa dapat dimanfaatkan dan dioptimalkan pengelolannya dengan ide dan gagasan juga inovasi yang terbangun dalam masyarakat desa, yang nantinya akan membentuk suatu nilai dan budaya pada masyarakat desa.

Seperti di Kampung Cibunut yang memanfaatkan potensi desanya untuk mengubah suatu kawasan pemukiman yang kumuh menjadi kampung berwarna dan menjadikan kawasannya bebas dari sampah. Hal tersebut tentunya melalui proses yang panjang untuk dapat menstimulus dan mendorong masyarakat Kampung Cibunut untuk bergerak bersama membangun daerahnya, tetapi dengan motivasi yang kuat juga hal-hal

baik yang dijadikan suatu kebiasaan sehingga membudaya, menjadikan berhasilnya upaya dari masyarakat Kampung Cibunut untuk mengembangkan potensi daerahnya melalui partisipasi masyarakat Kampung Cibunut. Tokoh masyarakat setempat memiliki peran dan kontribusi penting untuk membentuk suatu wadah atau media yang tujuannya menggerakkan masyarakat untuk dapat membangun dan mengembangkan wilayahnya. Dengan program yang mengikutsertakan kontribusi masyarakat, harapannya masyarakat tidak lagi hanya menjadi obyek dari suatu pembangunan tetapi juga menjadi subyek dari proses pembangunan.

REFERENSI

- Faturahman, Burhanudin Mukhamad, Cintantya Andhita Dara Kirana, Dedy Dwi Putra, Andri Irawan, Salesius Vitalis Kolne. 2019 . *Strengthening Village Culture Literacy in the National Development*. Jurnal Sosial Politik Universitas Muhammadiyah Malang Vol. 5 No. 1, 2019.
- Faturahman, B. M. (2017). *Pemetaan Potensi Wilayah untuk Menunjang Kebijakan Pangan Kabupaten Pacitan*. JISPO, 7(2), 43–62.
- Kajian Pengembangan Kampung Kreatif. 2018. https://elib.unikom.ac.id/files/disk1/804/jbptunikompp-gdl-laelatular-40194-3-unikom_1-i.pdf
- Moeljarto, T. (1987). *Politik Pembangunan: Sebuah Analisis, Konsep, Arah dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Thalib, U. (2009). *Kajian Pembangunan Berbasis Komunitas, Studi Kasus Di Daerah Maluku*, 1–19.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 18 dan pasal 19 Tentang Desa.
- Healey, Patsy. 2003. *Collaborative Planning In Perspective, dalam Journal Planning Theory*. Vol. 2 No. 2 page 101–123. SAGE Publications: London, Thousand Oaks, CA and New Delhi.